

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bantul pada dasarnya memiliki potensi Desa Wisata yang sangat besar, akan tetapi kurang digali dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi wisata tersebut meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, pendidikan dan sentra industri kerajinan. Saat ini pengelola Desa Wisata yang masih kurang juga menjadi masalah yang menjadi penghambat pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bantul saat ini. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sinergi antara masyarakat dengan instansi-instansi terkait, misalnya masyarakat memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi wisata akan tetapi kurang diberikan dukungan oleh pemerintah ataupun sebaliknya dimana pemerintah sudah berupaya untuk memberikan dukungan akan tetapi masyarakatnya masih bingung dengan potensi wisata yang terdapat pada desa mereka.

Kemunculan Desa Wisata saat ini diketahui hanya mengikuti Desa Wisata lain dan untuk kepentingan sesaat saja, dimana adanya keinginan untuk meniru Desa Wisata yang sudah ada, akan tetapi untuk selanjutnya belum terpikirkan dan belum terkonsep. Sehingga wajar, jika banyak Desa Wisata yang tiba-tiba muncul dan kemudian hilang.<sup>1</sup> Permasalahan seperti

---

<sup>1</sup><http://krjogja.com/read/146922/desa-wisata-diy-perlu-revitalisasi.kr> April 23 2014

ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang belum begitu mengerti kriteria Desa Wisata yang sebenarnya. Misalnya potensi wisata yang terdapat pada desa mereka belum jelas akan tetapi sudah membuat Desa Wisata, yang kemudian diketahui bahwa desa tersebut bukan Desa Wisata akan tetapi hanya desa yang memiliki data islah dan lokasinya di suatu desa. Sehingga saat ini banyak Desa Wisata Kabupaten Bantul yang telah dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul akan tetapi memiliki potensi yang kurang jelas hal tersebut juga dikarenakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebelumnya tidak mengetahui terlebih lanjut potensi yang terdapat pada Desa Wisata tersebut apakah baik untuk dikembangkan atau tidak.

Desa Wisata sebenarnya merupakan konsep pariwisata berbasis masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri dan diyakini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu maju mundurnya Desa Wisata tergantung pada pengelolaan dan sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal.<sup>2</sup> Hal tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih dalam karena pengembangan Desa Wisata dibutuhkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaku instansi yang berwenang dalam mengembangkan Potensi wisata yang selama ini belum dikembangkan secara optimal di Kabupaten Bantul. Sehingga nantinya akan meningkatkan jumlah pemasukan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diketahui merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Objek Wisata Kabupaten Bantul juga lebih

---

<sup>2</sup><http://travel.kompas.com/read/2013/03/04/14380449/Desa.Wisata.Harus.Dikelola.Secara.Inovatif>.  
Maret 28, 2014

dikenal dikalangan masyarakat luas, karena dengan begitu Objek wisata di Desa Wisata ini akan lebih terekspos dan dikenal kalangan masyarakat luas baik di dalam maupun di luar negeri.

Keanekaragaman objek wisata tersebut diharapkan secara optimal dapat mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai tujuan utama yang ada di Indonesia.<sup>3</sup> Meskipun dilihat dari retribusi objek wisata Kabupaten Bantul lebih baik dibandingkan Kabupaten Sleman, akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah pemasukan PAD tahun 2010-2012 dalam bidang pariwisata dan jumlah wisatawan Kabupaten Sleman lebih unggul dari Kabupaten lain yang terdapat di Provinsi DIY seperti Kabupaten Bantul, Gunung kidul, Kulon Progo. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan tabel di bawah ini :

---

<sup>3</sup> [http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0702\\_obyek\\_wisata.html](http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0702_obyek_wisata.html) September 25, 2013

Tabel 1.1.

**Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sub Sektor  
Pariwisata Provinsi DIY Tahun 2010 – 2012 per Kabupaten/Kota)**

No	Kab / kota	2010	2011	2012
1	Kota Yogyakarta	50.472.624.960	56.368.254.594	76.842.342.512
2	Kab. Sleman	36.634.676.263	38.943.756.254	53.194.912.852
3	Kab. Bantul	5.098.131.002	5.335.241.250	8.640.795.116
4	Kab. Kulon Progo	1.610.886.594	1.177.811.000	2.110.851.769
5	Kab. Gunung Kidul	1.845.743.858	2.309.007.231	8.478.767.503
6	Pemda Prov. DIY	21.180.100	17.581.175	17.876.510
Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Provinsi DIY		95.683.242.777	104.151.651.504	149.285.554.626

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DIY*

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan yaitu tahun 2010-2012 terkait jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata Provinsi DIY. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi DIY, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul memiliki jumlah yang lebih tinggi di bandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Gunung kidul sedangkan untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas Kabupaten Bantul terkait jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata setiap tahunnya.

Tabel 1.2.

Jumlah Wisatawan Daya Tarik Wisata Per Kabupaten / Kota  
Daerah Istimewayogyakarta (DIY) Tahun 2008-2012

No	Kab / kota	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kota Yogyakarta	2.467.383	3.428.324	3.538.139	3.197.312	4.083.605
2	Kab. Sleman	1.413.839	2.068.893	2.499.877	2.490.063	3.042.232
3	Kab. Bantul	1.417.253	1.447.546	1.300.042	1.756.372	2.356.578
4	Kab. Kulon Progo	543.821	410.131	444.125	546.797	596.529
5	Kab. Gunung Kidul	427.071	529.319	488.805	688.405	1.279.065
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Provinsi DIY	6.269.367	7.884.213	8.270.988	8.678.949	11.358.009

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DIY*

Berdasarkan table 1.2 diketahui bahwa setiap tahunnya yaitu tahun 2008-2012 terjadi peningkatan terkait dengan jumlah wisatawan yang berkunjung di objek wisata Provinsi DIY. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi DIY, jumlah pengunjung di Kabupaten Bantul memiliki angka yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul sedangkan untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas Kabupaten Bantul terkait angka jumlah pengunjung setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki lebih banyak objek wisata yang sudah lebih dikenal pada kalangan masyarakat luas.

Kinerja pegawai merupakan interaksi antara motivasi dan kemampuan dimana kinerja merupakan hal yang sangat penting dibutuhkan dalam rangka menunjang pencapaian suatu instansi pemerintah. Selain itu budaya suatu instansi juga sangat mempengaruhi kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat, maka perpindahan pegawai dari satu instansi ke instansi lain akan sangat berpengaruh dengan kinerja karyawan untuk waktu kedepan karena terdapat perbedaan budaya antara satu Dinas dengan Dinas lainnya. Apabila hal tersebut terjadi pegawai harus menyesuaikan budaya organisasi di tempat yang baru dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama.<sup>4</sup>

Terlepas dari itu, kepemimpinan yang baik juga memiliki pengaruh penting dalam peningkatan kinerja pegawai karena pemimpin memiliki peran sebagai seseorang yang memberikan dorongan, semangat dan dukungan untuk para pegawai. Selain itu Sumber daya manusia (SDM) juga merupakan aset yang sangat penting dalam suatu Dinas, karena pegawai akan berpotensi positif terhadap pencapaian tujuan suatu Dinas bila dikelola dengan baik dan tepat. Selanjutnya kelengkapan fasilitas juga merupakan faktor yang berpengaruh pada peningkatan kinerja karena sebagai salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan suatu Dinas/Instansi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Subhan Z, " *Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi LAIN AR-RANIRY Banda Aceh* " dalam Jurnal Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Vol 2, No 1, November 2012

<sup>5</sup> Ibid

Kemajuan pembangunan pariwisata memerlukan suatu ukuran yaitu indikator kinerja dari Dinas Pariwisata yang dapat dipercaya, akurat dan valid. Indikator kinerja yang digunakan memiliki peran penting sebagai masukan dalam pengelolaan kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya pengembangan pariwisata. Untuk itu sangat dibutuhkan kinerja yang maksimal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan program kerjanya. Contohnya seperti memaksimalkan promosi kawasan wisata, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pelestarian dan pengembangan wisata. Hal tersebut penting dilakukan karena Pertumbuhan Desa Wisata di Kabupaten Bantul diketahui relatif lamban dibanding objek wisata lainnya dikarenakan hanya dikelola oleh masyarakat saja tanpa bantuan dari investor.<sup>6</sup>

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas penulis bermaksud untuk melakukan Penelitian yang akan membahas serta menganalisis tentang "*Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Desa Wisata tahun 2013*".

---

<sup>6</sup> <http://www.harianjogja.com/baca/2010/10/20/pertumbuhan-desa-wisata-di-bantul-lamban-142658> September 25, 2013

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah, adalah :

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Desa Wisata Tahun 2013?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung & penghambat kinerja dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Desa Wisata tahun 2013?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya dalam penelitian ini maka tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai, adalah :

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Desa Wisata tahun 2013.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Desa Wisata tahun 2013.



## **2 Manfaat penelitian**

- a. Sebagai masukan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pengembangan Desa Wisata.
- b. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi jurusan Ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik universitas muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengamat ataupun akademisi pariwisata.

## **D. KERANGKA DASAR TEORI**

Pengetahuan lebih lanjut mengenai teori-teori terkait dari latar belakang masalah penelitian sangat penting karena nantinya akan lebih memahami masalah yang akan diteliti dan tidak akan menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun dasar-dasar teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

### **1. Kinerja**

Menurut Purwodarminto, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan padanya.<sup>7</sup> Sedangkan Menurut Armstrong dan Baron, kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis

---

<sup>7</sup>Purwodarminto, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1986, Hal 643

organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi kepada ekonomi.<sup>8</sup>

Sementara Prawiro Sentono juga berpendapat bahwa Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi di atas kinerja dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah direncanakan dan nantinya akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan dengan adanya tanggung jawab yang besar dari masing-masing individu ataupun kelompok yang berupaya untuk tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi publik sebaiknya mengadakan pembagian kerja dalam bentuk perincian tugas dari setiap karyawannya. Di dalam melaksanakan tugas, setiap karyawan tentunya wajib menyelesaikan dan menghasilkan kerja sesuai dengan yang ditentukan. Jika setiap karyawan mencapai tujuan suatu organisasi publik maka tujuan dari organisasi publik tersebut akan tercapai karena kinerja suatu organisasi publik dapat dicapai berdasarkan prestasi kerja dari

---

<sup>8</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hal 7

<sup>9</sup> Widodo, Joko, *Good Governance, Akuntabilitas dan control Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan cendikia, Surabaya, 2001, Hal 206

masing-masing individu yang ada di dalamnya. Bila setiap individu menyumbang prestasi yang minimal, maka kinerja suatu organisasi publik akan menjadi rendah.

Kenyataan bahwa birokrasi publik memiliki *stakeholders* yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan dengan lainnya membuat birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, ukuran dari kinerja organisasi publik di mata para *stakeholders* juga berbeda-beda. Namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik antara lain :

10

- a. Aspek produktivitas, (*Productivity*), yaitu konsep yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Konsep produktivitas yang dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba untuk mengembangkan satu ukuran dari produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
- b. Aspek kualitas pelayanan (*Quality of service*), Isu mengenai kualitas pelayanan semakin penting dalam menjelaskan kinerja

---

<sup>10</sup> Dwiyanto, Agus dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University pers, Yogyakarta, 2012

organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering dapat diperoleh dari media massa ataupun diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat dapat pula menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

- c. Aspek Responsivitas (*Responsiveness*), adalah kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjukkan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki Responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

- d. Aspek *Responsibilitas (Responsibility)*, *Responsibilitas* menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu *responsibilitas* bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan *responsivitas*.
- e. Aspek *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu *Akuntabilitas* publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempersentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep *akuntabilitas* publik dapat digunakan untuk melihat

seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional atau konsep yang memiliki berbagai dimensi dimana terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Mahmudi berpendapat bahwa terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain : <sup>11</sup>

- a. Faktor personal / individu, meliputi pengetahuan, keterampilan (*Skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manager dan *team leader*.

---

<sup>11</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hal 21

- c. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- d. Faktor Sistem, meliputi sistem, fasilitas, atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
- e. Faktor Kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Standar Pengukuran kinerja juga dapat dilakukan dengan mengukur empat hal, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan analisis pekerjaan dan uraian pekerjaan.
- b. Pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan mengukur sifat atau karakter individu (*traits*).
- c. Pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan mengukur hasil dari pekerjaan yang telah dicapai.
- d. Pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan mengukur perilaku atau tindakan-tindakan dalam mencapai hasil.

## **2. Pemerintah daerah**

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Ketentuan

---

<sup>12</sup> Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2009  
hal 11

tentang pemerintah daerah diatur dalam undang-undang otonomi daerah No. 32 tahun 2004. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran-peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Seperti yang diketahui berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi (otonomi daerah). Daerah kabupaten dan daerah kota yang berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membantu dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab, nyata dan luas. Otonomi yang bertanggung jawab sesuai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan pada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selanjutnya Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan pada semua bidang pemerintah, kecuali pada kewenangan, peradilan,



moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan dalam bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan daerah.<sup>13</sup>

Tujuan dari adanya otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :<sup>14</sup>

- a. Dari segi politik otonomi, dimaksud untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui proses pembangunan demokrasi di lapisan bawah, dalam hal ini ada kesetaraan dan partisipasi politik. Ini juga merupakan media politik untuk belajar berdemokrasi secara nyata.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan, otonomi dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik, terutama dalam penyediaan pelayanan publik.
- c. Dari segi kultural, otonomi dimaksudkan untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan atau kontekstualitas suatu daerah seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan ataupun latar belakang sejarahnya.

---

<sup>13</sup> Dedi Supriadi, Danang Solihin, *Otonomi penyelenggara pemerintah daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002

<sup>14</sup> Kawo, Joseph Riwo, *Otonomi daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDA Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal 21

- d. Dari segi pembangunan, otonomi dapat melancarkan proses formulasi dan implementasi program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah :

- a. Digunakannya Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan
- b. Penyelenggaraan Asas Desentralisasi secara utuh dan bulat yang didasarkan di daerah kabupaten/ kota
- c. Asas Tugas Pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa

Bupati sebagai unsur pemerintah daerah serta pimpinan daerah mempunyai tugas melaksanakan kewajiban umum dan menyelenggarakan segala kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembinaan yang telah ditetapkan. terdapat beberapa fungsi yang diselenggarakan oleh bupati, antara lain :

- a. Pimpinan daerah yang harus membina perangkat daerah secara keseluruhan agar berdaya guna dan berhasil berguna dalam menyelenggarakan kewenangan daerah.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengadilan penyelenggaraan kewenangan daerah.

c. Pengkoordinasian tugas instansi vertical yang ada di daerah.

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya upaya yang dilakukan pemerintah daerah, yang berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat di daerahnya tersebut.

### **3. Pariwisata**

#### **a. Pengertian Pariwisata**

Menurut Oka A. Yoety, pariwisata adalah pengalaman mendatangi atau mengunjungi dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian serta kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial dan budaya alam.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut pandangan Kodhyat, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara, dilakukan secara perorangan ataupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial budaya, alam, dan ilmu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yoety, Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa Bandung, 1985, Hal 15

<sup>16</sup> Kohdyat dalam Spillane, James J, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, Hal 21

Menurut undang-undang No.10 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 tentang Kepariwisataaan :

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang tersedia oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”.<sup>17</sup>

Pendapat lain juga berpendapat Pariwisata merupakan perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin dan keluar dari tempat kediamannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan sementara waktu yang dilakukan dari satu tempat ketempat yang lain oleh seseorang dengan meninggalkan aktivitas-aktivitas rutinnnya, dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tersebut.

#### **b. Pengelolaan Pariwisata**

Prinsip pada penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta melibatkan partisipasi aktif yang sinerjis atau terpadu dan saling menguatkan

---

<sup>17</sup> Undang-undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

<sup>18</sup> Marpaung Happy, *pengetahuan kepariwisataan*, ALFABETA, Bandung, 2000, Hal 13

antara pihak pemerintah, swasta/industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terlibat.

Secara teoritis pola manajemen penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini :<sup>19</sup>

- 1) Partisipasi masyarakat terkait, dimana masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.
- 2) Keterlibatan segenap pemangku kepentingan, karena para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pengembangan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM pariwisata, kelompok sukarelawan, Pemerintah Daerah,

---

<sup>19</sup> Sunaryo, Bambang. *Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2013, Hal 77

Asosiasi Industri Wisata, Asosiasi Bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

- 3) Kemitraan kepemilikan lokal, karena pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata dan lain sebagainya. Sebaiknya dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinerjis.
- 4) Pemanfaatan sumber daya secara berlanjutan, karena pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjutan, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan.
- 5) Mengakomodasikan aspirasi masyarakat, dimana aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara

pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik.

- 6) Daya dukung lingkungan, dimana dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan budaya.
- 7) Monitor dan evaluasi program, dimana kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.
- 8) Akuntabilitas lingkungan, karena perencanaan program pembangunan pariwisata harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan pariwisata yang ada.

9) Pelatihan untuk masyarakat terkait, karena pembangunan kepariwisataan secara berlanjut membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *profesional*.

10) Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan, karena pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat identitas budaya masyarakat setempat secara baik.

### **c. Segmen Pariwisata**

Segmen pariwisata pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat umum tanpa memandang status sosialnya dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan suasana lain dari rutinitas sehari-hari. Segmen pariwisata bagi masyarakat umum dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

1) Bagi wisatawan dalam negeri (wisatawan domestik), yaitu segmen pariwisata ini khusus ditujukan bagi masyarakat didalam negeri itu sendiri atau wisatawan lokal.



- 2) Bagi masyarakat luar negeri (wisatawan manca negara), yaitu segmen pariwisata ditujukan bagi turis manca negara agar mereka tertarik untuk datang dan berkunjung yang tentunya dengan menonjolkan kelebihan dari objek wisata tersebut.

#### 4. Desa Wisata

Desa Wisata pada dasarnya merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen Desa Wisata, antara lain :<sup>20</sup>

- a. Akomodasi yaitu sebagian dari tempat tinggal para penduduk dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- b. Atraksi yaitu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa, dan lain-lain yang bersifat spesifik.

---

<sup>20</sup> Nuryanti, Wiendu. *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya, Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada, 1993, hal. 2-3

Menurut Sujarwati, Desa Wisata adalah pariwisata yang dimotori oleh masyarakat pedesaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pedesaan itu sendiri. Desa Wisata muncul karena desa tersebut memiliki potensi atau kekayaan yang dapat atau layak untuk dijual oleh masyarakatnya sendiri atau wisatawan. Obyek Desa Wisata adalah desa dengan potensinya, sedangkan pemrakarsanya adalah penduduk Desa itu yang memiliki kemauan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Subagyo, Desa Wisata merupakan bentuk desa yang memiliki ciri khusus di dalamnya, baik alam ataupun budayanya. Sehingga desa tersebut memiliki peluang untuk dijadikan komoditas bagi wisatawan. Jika dilihat berdasarkan objek Desa Wisata merupakan tujuan kegiatan pariwisata sedangkan untuk subjeknya adalah sebagai penyelenggara, sehingga penghasilan dari Desa Wisata nantinya akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Untuk itu peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan Desa Wisata itu sendiri.<sup>22</sup>

Pendapat lain menyebutkan Desa wisata merupakan sebuah kawasan perdesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk dijadikan daerah tersebut sebagai tujuan wisata. Pada kawasan wisata

---

<sup>21</sup> Sujarwati, *Pegangan Meteri Bimbingan Tehnis untuk Desa-desa Wisata*, Pusat Informasi Desa-desa Wisata DIY, 2007, hal 5

<sup>22</sup> Winarsih, Atik Septi dan Suranto, *Desain Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasca Gempa Melalui Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Pundong*, 2008

ini masyarakatnya masih memiliki tradisi dan budaya yang masih asli serta berupaya untuk mempertahankan tradisi tersebut. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, alam, lingkungan dan sistem sosial yang turut mewarnai sebuah kawasan Desa wisata serta menjadi faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan diketahui bahwa Desa Wisata merupakan sebuah kawasan perdesaan yang memiliki beberapa karakteristik atau potensi khusus untuk dijadikan sebagai tujuan wisata yang dimotori oleh masyarakat perdesaan. Dimana pemanfaatan karakteristik dan potensi tersebut dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perdesaan itu sendiri.

Diketahui bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) jenis daya tarik wisata, yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Daya tarik wisata alam, yaitu daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada anugrah keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam seperti pantai, gunung, danau, hutan, sungai, air terjun dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> <http://www.central-java-tourism.com/desa-wisata/in/about.htm> November 30, 2013

<sup>24</sup> Sunaryo, Bambang. *Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2013, Hal 25

- 2) Daya tarik wisata budaya, yaitu daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan ciptaan manusia, baik berupa peninggalan budaya maupun nilai budaya yang masih hidup dalam kehidupan di suatu masyarakat, berupa adat istiadat, seni pertunjukan, seni kriya, seni sastra, seni rupa maupun keunikan kehidupan sehari-hari yang dimiliki oleh suatu masyarakat.
- 3) Daya tarik wisata minat khusus, yaitu daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik, seperti pengamatan terhadap satwa tertentu, memancing, arung jeram, dan aktivitas-aktivitas wisata lainnya yang terkait dengan hobi dan kegemaran seorang wisatawan.

#### **E. DEFINISI KONSEPTUAL**

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan (*over laping*) dalam memahami konsep yang nantinya akan dikemukakan. Definisi konseptual pada penelitian ini antara lain :

1. Kinerja adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu Dinas/Instansi yang disesuaikan dengan wewenang dan tanggung jawab yang ada, dalam rangka mencapai tujuan Dinas/Instansi secara legal serta tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika.
2. Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintahan di dalam suatu Negara yang berdaulat serta dibentuk secara politik berdasarkan suatu undang-undang yang mempunyai lembaga-lembaga atau badan-badan di dalamnya serta menjalankan roda pemerintahan yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah tersebut yang dilengkapi pula dengan kewenangan untuk membuat peraturan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata itu sendiri sehingga menarik simpati banyak orang untuk mengunjunginya.
4. Desa Wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang masih menonjolkan nilai budaya dan memiliki karakteristik khusus serta memiliki potensi yang dapat atau layak untuk dijual oleh masyarakatnya untuk para wisatawan.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi Operasional adalah petunjuk dan pelaksana yang menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga penelitian

ini lebih jelas dan terarah. Adapun Indikator-indikator dalam penelitian ini yaitu kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya pengembangan Desa Wisata, antara lain :

A. Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berorientasi pada hasil yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa Wisata. Adapun Hasilnya dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

#### 1. Aspek Produktifitas

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul untuk Desa wisata Kabupaten Bantul
- b. Peningkatkan jumlah pengunjung, PAD Sub Pariwisata dan Desa Wisata

#### 2. Aspek Kualitas pelayanan

- a. Bentuk pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Desa Wisata.
- b. Kreatifitas dan keterampilan pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas pelayanan

#### 3. Aspek Responsivitas

- a. Kemampuan pegawai dalam melayani dan memberikan informasi terhadap masyarakat Desa Wisata.

- b. Tanggapan Dinas Pariwisata dalam menanggapi kritikan dari masyarakat

#### 4. Aspek Responsibilitas

- a. Pencapaian Program / kegiatan sesuai dengan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- b. Adanya semangat kerja dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk Desa Wisata.

#### 5. Aspek akuntabilitas

- a. Komunikasi yang baik antara Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bantul dan masyarakat Desa Wisata.
- b. Adanya suatu pertanggung jawaban dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pengembangan Desa Wisata Kabupaten Bantul.

B. Faktor-faktor yang berpengaruh terkait kinerja Dinas Pariwisata dalam pengembangan Desa Wisata Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Faktor Personal / Individu
2. Faktor Kepemimpinan
3. Faktor Sistem

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

Menurut Hadari Nawawi metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, kelompok atau masyarakat) yang berdasarkan yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>25</sup>

Sedangkan Taylor dan Bogdan berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati orang-orang yang diteliti.<sup>26</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Tujuan dari penelitian

<sup>25</sup> Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 2001, hal 6

<sup>26</sup> Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta, 2005, Hal 166



deskriptif kualitatif adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

## **2. Jenis Data**

### **a. Data primer**

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari Informan atau narasumber yang terkait dengan penelitian ini dan mampu memberikan informasi serta yang berisi tentang variabel penelitian, data ini dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Meliputi kepala dan sekretaris Dinas pariwisata Kabupaten Bantul dan staf-staf.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data hasil kutipan yang diperoleh dari sumber lain atau tidak diperoleh dari informan secara langsung berupa arsip-arsip, surat kabar, majalah, buku, dokumen-dokumen atau arsip-arsip, foto maupun video yang memiliki data tentang variabel penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang diperoleh berupa data lisan dari berbagai informan melalui percakapan yang sistematis dan terencana. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk wawancara bertahap, dimana wawancara akan dilakukan secara bertahap dan peneliti tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial dari informan.<sup>27</sup> Wawancara akan ditujukan kepada Staf-staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dan Beberapa Masyarakat Desa Wisata.

#### b. Observasi

Observasi adalah usaha pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Observasi pada penelitian ini yaitu melihat secara langsung bagaimana kondisi atau keadaan Desa Wisata pada Kabupaten Bantul. selain itu peneliti juga melakukan observasi dengan mengunjungi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk melihat proses kerja para pegawai.

---

<sup>27</sup> Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, kencana Prenata Group, Jakarta, 2007, Hal 110

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah, cara pengumpulan data dengan menggunakan dan mempelajari berbagai dokumentasi atau arsip-arsip, catatan, tabel, peta, tempat yang dijadikan penelitian, dan lain sebagainya. Berdasarkan dokumentasi yang ada nantinya akan memberikan gambaran tentang keadaan daerah penelitian.<sup>28</sup> Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni, Data-data Gambaran Umum Kabupaten Bantul, Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dan data-data terkait program dan kegiatan bagian Pemasaran dan Kemitraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Desa Wisata tahun 2013.

#### 4. Unit Analisa Penelitian

Dikarenakan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Desa Wisata tahun 2013 maka unit analisa dari penelitian ini adalah Dinas pariwisata Kabupaten Bantul dimana yang dijadikan sebagai informan adalah Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Pemasaran Kemitraan dan Masyarakat Desa Wisata.

---

<sup>28</sup> Kuntjoronigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999, Hal 228

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Deskriptif Kualitatif dimana data dan bahan yang nantinya akan digunakan adalah data yang diperoleh di lapangan dan kemudian di dukung dengan data-data lain seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam penggunaan data hingga pengambilan keputusan antara lain :<sup>29</sup>

- a. Mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- b. Memeriksa data yang diperoleh di lapangan, yaitu mengadakan pemeriksaan data yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- c. Menyusun klarifikasi informasi dari data yang diperoleh, dimana input ini diperoleh melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan informasi, pemrosesan data, dan dari setiap tahapan tersebut dapat mempengaruhi akurasi dan kualitas kesimpulan yang akan didapatkan nantinya.

---

<sup>29</sup> Maleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990, Hal 3

- d. Mendeskripsikan dan menganalisis sekaligus menginterpretasikan data. Analisis data didasarkan pada jenis informasi dan kategori laporan penelitian dimana jenis informasinya bisa berupa deskriptif.
- e. Mengambil kesimpulan, yaitu merupakan tahap paling akhir yang memberi informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti secara singkat dan padat dari keseluruhan data dan laporan yang diperoleh dari penelitian.